

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan telah ada sejak zaman dahulu kala, yang melibatkan para pedagang yang di seluruh dunia untuk berkeliling melintasi dunia. Para pedagang tersebut menawarkan barang dagangannya melintasi batas suatu negara baik melalui jalur darat maupun jalur laut. Namun pada era sekarang ini, perdagangan internasional dilakukan oleh suatu negara untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Perdagangan internasional terjadi karena setiap negara ingin mendapatkan *gain of trade*, yang akan dinikmati oleh negara penghasil (eksportir) dan negara pembeli (importir). Manfaat dari perdagangan tersebut akan berdampak langsung terhadap perekonomian suatu negara, sehingga terciptanya suatu kebijakan yang bernama liberalisasi perdagangan.

Liberalisasi perdagangan terus berkembang mengingat pentingnya manfaat dari perdagangan antar negara itu sendiri. *Gain of trade* ialah suatu kondisi ketika suatu negara menjual barang dan jasa kepada negara lain, dimana pertukaran barang dan jasa tersebut menimbulkan keuntungan kepada kedua pihak yang terlibat (Krugman dan Obstfeld, 2003). Salah satu tujuan dari liberalisasi perdagangan adalah untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan menangkap secara statis dan dinamis keuntungan dari perdagangan melalui efisiensi alokasi sumber daya yang lebih (Santos-Paulino dan Thirlwall, 2004).

Perdagangan bebas antar negara akan memberi manfaat besar terhadap perekonomian suatu negara, sehingga perlu melibatkan liberalisasi perdagangan.

Carbaugh (2004), menyatakan bahwa liberalisasi perdagangan adalah kebijakan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif, sehingga proses liberalisasi akan mereduksi hambatan yang ditetapkan di suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan mendorong kesempatan yang besar bagi suatu negara untuk melakukan perdagangan internasional.

Isu globalisasi sering dikaitkan dengan liberalisasi perdagangan internasional. Proses menuju liberalisasi perdagangan internasional antar negara selalu ditemui adanya berbagai hambatan. Hambatan tersebut bisa berupa tarif atau non tarif. Carbaugh (2004), menyatakan bahwa tarif yaitu sebagai pajak yang dikenakan untuk suatu produk yang melewati lintas batas territorial. Pada saat ini, sebagian besar pemerintah memberlakukan restriksi perdagangan untuk motif proteksi atau untuk mengecoh negara lain melalui kebijakan non tarif, seperti anti dumping, pembatasan ekspor, kuota impor, dan lain-lain.

Tabel 1.1
Tarif Rata-Rata dan Tahun Pemberlakuan di Negara ASEAN (%)

No.	Negara	Tahun	Tarif Rata-Rata
1	Indonesia	2012	6%
2	Thailand	2011	12%
3	Filipina	2011	7%
4	Singapura	2009	0%
5	Malaysia	2010	5%
6	Brunei Darussalam	2011	1%
7	Vietnam	2009	12%
8	Kamboja	2010	11%
9	Laos	2008	11%
10	Myanmar	2008	6%

Sumber : tariff.findthedata.com (2014),diolah

Tabel 1.1 diatas menunjukkan, tarif rata-rata di negara ASEAN dan tahun pemberlakuan tarif. Data diatas, diambil dari website *tariff.findthedata.com* yang menjelaskan tahun terakhir negara-negara di ASEAN menyerahkan *tariff schedule* ke lembaga perdagangan dunia yaitu *World Trade Organization*. Dari data diatas terlihat bahwa Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Laos menunjukkan tarif rata-rata yang masih tinggi yaitu diatas 10%, sedangkan negara sisanya, yaitu Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Myanmar masih kurang dari 10%. Singapura contohnya, tarif rata-ratanya 0%. Ini berarti Singapura memberlakukan penghapusan tarif seutuhnya. Hal ini disebabkan karena Singapura adalah negara yang mengutamakan sektor perdagangan dan sangat bergantung pada ekspor dan impor. Begitu juga dengan negara Brunei Darussalam yang menunjukkan tarif rata-rata sebesar 1%.

Perekonomian dunia mengalami proses liberalisasi perdagangan ditandai dengan mulai terbentuknya *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947 yang perannya sekarang telah digantikan oleh *World Trade Organization* (WTO). Dalam perjalanannya, konsep globalisasi tersebut mengalami perubahan dengan terbentuknya kelompok perdagangan berdasarkan kedekatan wilayah (integrasi regional) atau berdasarkan skala ekonomi. Implementasi adanya fenomena tersebut adalah terbentuknya berbagai *Free Trade Area* (FTA).

Liberalisasi dimulai di Jepang, diikuti Korea Selatan dan Taiwan pada tahun 1950-an. Pada saat sebagian besar negara berkembang lain memberlakukan rezim substitusi impor dan intervensi negara (Ciptowiyono, 2014), negara-negara ini mengalami perkembangan ekonomi tinggi melalui liberalisasi selektif dan

masih mempertahankan perlindungan impor dan pembatasan investasi. Mereka secara bertahap meliberalisasi impor dan *Foreign Direct Investment* (FDI). Hongkong mengikuti memberlakukan perdagangan bebas dan keterbukaan investasi setelah Perang Dunia Kedua dan diikuti oleh Singapura. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya (Malaysia, Thailand, Indonesia dan Filipina) melakukan liberalisasi perdagangan dan penanaman modal asing secara signifikan sejak tahun 1970-an. Negara-negara di kawasan Indocina mulai menerima pasar bebas secara bertahap pada 1980-an. Vietnam mempercepat liberalisasi perdagangan dan investasi asing dalam rangka persyaratan keanggotaan WTO pada 2006.

Pada tahun 1992, Indonesia bersama lima Negara ASEAN yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Brunei Darussalam menandatangani perjanjian *Asean Free Trade Area* (AFTA) tepatnya pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura. AFTA merupakan blok perdagangan yang dibentuk oleh ASEAN. Kemudian Vietnam bergabung pada tahun 1995, Laos dan Myanmar ditahun 1997, dan Kamboja juga menyusul bergabung di tahun 1999.

Tujuan dari dibentuknya AFTA ini secara eksternal adalah untuk meningkatkan intensitas perdagangan intra ASEAN di pasar internasional, sedangkan secara internal adalah mengurangi kesenjangan antar negara dalam wilayah kerja sama tersebut. Untuk melaksanakan tujuan tersebut maka disepakati *Common Effective Prefential Tarif* (CEPT) yaitu bertujuan untuk meningkatkan kegiatan perdagangan melalui pemberian tarif preferensi kepada produk-produk yang sama hasil produksi Negara anggota ASEAN (Tambunan,2004).

Pada tahun 2002, ASEAN mulai mengembangkan liberalisasinya, yaitu dengan memperluas kerjasama internasional dengan negara China. *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA). Melalui kesepakatan ini, diharapkan industri domestik di negara-negara ASEAN bisa memperluas pasarnya. Beberapa tahun kemudian ASEAN melakukan perkembangan liberalisasi dengan bekerja sama dengan negara-negara maju lainnya. Salah satu kerjasama yang dijalin oleh ASEAN dalam rangka mewujudkan perdagangan bebas tersebut adalah dengan Korea Selatan ditahun 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kerjasama tersebut kemudian kita kenal dengan nama *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AKFTA). Awal dari kerjasama ini bisa kita telusuri sejak tahun 1989 ketika pemerintah Korea Selatan dan Pemerintah Negara-negara anggota ASEAN menginisiasi sebuah forum dialog, kemudian berbagai rencana kerjasama mulai dibangun hingga Korea Selatan akhirnya menjadi salah satu negara yang menjadi partner dialog ASEAN pada tahun 1991. AKFTA telah menjadi sebuah persetujuan FTA yang komprehensif dengan telah ditandatanganinya persetujuan-persetujuan dibidang perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi.

Kerjasama internasional ASEAN dengan negara-negara maju tidak berhenti disini. Pada tahun 2008, ASEAN menambah lagi kerjasama internasionalnya, yaitu dengan negara Jepang yang disebut dengan *Asean-Japan Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP). Pada tahun 2009 dengan Australia-New Zealand yang disebut dengan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA) serta dengan India yaitu *Asean-India Free Trade Area* (AIFTA).

Sebagian besar teori menyatakan bahwa globalisasi dalam bentuk integrasi regional akan menghasilkan manfaat yang setara. Keunggulan komparatif yang dimiliki anggota blok perdagangan bukan bertujuan menggusur pangsa pasar negara tertentu, tetapi lebih pada pemenuhan permintaan secara bersama-sama. Beberapa berpendapat bahwa liberalisasi di Asia dapat meningkatkan perdagangan. Disisi lain ada juga beberapa pendapat yang bertentangan dengan pendapat diatas. Andriansyah (2014) berpendapat bahwa *Free Trade Area* kurang membawa dampak terhadap peningkatan kinerja sektor manufaktur di Indonesia. Saat industri domestik belum siap, maka menghasilkan peningkatan impor yang signifikan dan yang terjadi bukanlah perbaikan perekonomian, melainkan memburuknya neraca perdagangan (*balance of trade*).

Neraca pembayaran adalah suatu catatan yang berisi aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh suatu badan kenegaraan yang berupa transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk di negara lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Neraca pembayaran dapat mencakup aktifitas ekonomi berupa pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu pemerintah asing, serta transaksi financial lainnya. (Tyo, 2014). Dalam komponen neraca pembayaran terdapat pos neraca perdagangan yang mencatat transaksi perdagangan internasional baik dari sisi ekspor maupun impor suatu barang. Bila hasilnya positif maka disebut surplus, sebaliknya bila hasilnya negatif maka disebut defisit. Dalam jangka panjang, defisit neraca perdagangan akan memperlemah nilai mata uang. Hampir seluruh negara pasti menginginkan neraca perdagangannya mengalami surplus, atau setidaknya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan neraca perdagangan bisa dilakukan melalui usaha

meningkatkan ekspor, menurunkan impor, atau bahkan keduanya. Dampak neraca pembayaran terhadap kegiatan ekonomi suatu negara yaitu dapat menimbulkan perubahan terhadap kurs devisa, harga, tingkat pendapatan, dan tingkat bunga.

Sebagian besar negara-negara di ASEAN adalah negara berbasis ekspor karena perekonomiannya lebih mengandalkan tingkat konsumsi domestik, sedangkan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi relatif kecil serta komoditas yang diandalkan masih bertumpu pada ekspor komoditas tertentu. Besarnya tingkat konsumsi domestik didorong dari besarnya jumlah penduduk dan tingginya tingkat pertumbuhan kelas menengah. Jika tidak disertai peningkatan kapasitas produksi nasional, maka akan terjadi peningkatan impor (Ardiansyah, 2014). Ketakutan selama ini berkaitan dengan daya saing produk dalam negeri yang masih kalah dengan produk dari negara lain, seperti produk dari China. Contohnya seperti produk tekstil Indonesia yang kalah bersaing dengan produk dari China, dengan mutu yang lebih bagus dan harga yang relatif lebih murah. Produk tekstil dari China menjadi pilihan di pasar tekstil di Indonesia.

Liberalisasi perdagangan dan keterbukaan ekonomi juga memberikan akses pada ilmu-ilmu pengetahuan bagi negara berkembang, dan menciptakan iklim kompetisi yang lebih ketat (Carbaugh, 2002). Kompetisi sangat penting bagi terjadinya inovasi dan produksi yang efisien. Lebih jauh lagi, kompetisi perdagangan internasional memaksa produsen domestik untuk tetap bertahan dengan memberi dorongan yang kuat untuk memperbaiki kualitas produk-produknya agar tidak kalah bersaing dengan produsen asing. Pertumbuhan ekspor suatu negara diharapkan bergantung terutama pada daya saing (diukur sebagai

harga relatif ekspor suatu negara terhadap harga barang-barang luar negeri yang dinyatakan dalam mata uang bersama) dan tingkat permintaan dunia yang menentukan pergeseran kurva permintaan untuk sebuah barang di suatu negara. (Santos-Paulino dan P. Thirlwall, 2004).

Liberalisasi perdagangan berhubungan dengan pembukaan akses pasar produk ekspor suatu negara ke dunia. Namun terbukanya akses pasar produk ekspor tersebut memunculkan suatu keadaan bahwa pasar domestik suatu negara juga terbuka bagi produk impor negara lain. Liberalisasi perdagangan yang berusaha untuk menghilangkan hambatan perdagangan dapat meningkatkan ekspor, namun di lain pihak juga meningkatkan impor. Dalam globalisasi, liberalisasi perdagangan internasional cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak berkembang.

Investasi asing yang bertambah menyebabkan aliran pembayaran keuntungan (pendapatan) investasi ke luar negeri semakin meningkat. Gencarnya proses liberalisasi perdagangan yang dilakukan suatu negara tentu berkaitan dengan tujuan suatu negara yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui surplus neraca perdagangan. (Hamdani, 2012). Devaragan dan Lewis (1990) menunjukkan bahwa perubahan *term of trade* (TOT) pada negara-negara sedang berkembang telah menimbulkan efek pendapatan yang menyebabkan permintaan produk untuk kebutuhan domestik meningkat dengan kecenderungan impornya lebih tinggi. Dengan demikian yang terjadi bukanlah perbaikan ekonomi negara-negara tersebut, akan tetapi adalah memburuknya neraca perdagangan (*balance of trade*). Anggarwal dan Agmon dalam Wijaya (2000), menunjukkan bahwa negara

yang melakukan investasi asing di negara berkembang akan menikmati manfaat besar, tapi manfaat bagi negara berkembang masih menjadi pertanyaan.

Santos-Paulino dan Thirlwall (2004) meneliti liberalisasi perdagangan di negara sedang berkembang di dunia. Mereka menyimpulkan bahwa liberalisasi berdampak pada ekspor, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, upah dan distribusi pendapatan, sedangkan untuk impor, neraca pembayaran dan neraca perdagangan dampaknya sangat kecil. Mereka berpendapat jika liberalisasi perdagangan mengarah ke pertumbuhan impor daripada ekspor, ini menimbulkan implikasi neraca perdagangan dapat menghambat pertumbuhan dari komoditas yang berpotensi. Liberalisasi meningkatkan pertumbuhan dari sisi penawaran melalui alokasi sumber daya alam yang lebih efisien sedangkan dari sisi permintaan akan menghambat pertumbuhan ekonomi kecuali keseimbangan antara ekspor dan impor dapat dipertahankan melalui depresiasi mata uang atau pembiayaan arus modal masuk berkelanjutan. Khan dan Zahler (1985) meneliti efek liberalisasi perdagangan dan finansial pada ekonomi Argentina, Chile, dan Uruguay. Mereka menemukan bahwa volume perdagangan meningkat tetapi rekening giro neraca pembayaran mengalami defisit berat. Aliran modal yang dihasilkan oleh perbedaan tingkat suku bunga tidak cukup untuk membiayai defisit tanpa penyesuaian yang baik. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa nilai impor meningkat lebih cepat daripada nilai ekspor. Kamal (2012) meneliti dampak liberalisasi perdagangan terhadap neraca perdagangan negara berkembang. Penelitian ini menggunakan GTAP model dalam alat analisisnya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penghapusan tarif akan menurunkan sebagian besar ekspor Indonesia baik itu untuk komoditi

pertanian maupun komoditi manufaktur. Meski kebijakan tersebut tidak menurunkan semua ekspor semua komoditi, namun penurunan ekspor pada beberapa komoditi strategis cenderung akan merugikan Indonesia.

Umumnya liberalisasi perdagangan memiliki dampak terhadap ekspor dan impor di suatu negara. Hal tersebut juga pasti akan terjadi di ASEAN. Aliran Heckscher-Ohlin meyakini bahwa perdagangan bebas akan menguntungkan kedua belah pihak (Kamal, 2012). Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan impor di ASEAN-7. Sejauh ini belum ada penelitian yang melakukan kajian tersebut untuk kasus negara di ASEAN-7 sehingga diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi akademis yang signifikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh liberalisasi perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan impor secara simultan di negara-negara ASEAN-7 pada periode 1998-2013?
2. Bagaimana pengaruh liberalisasi perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan impor secara parsial di negara-negara ASEAN-7 pada periode 1998-2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh liberalisasi perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan impor secara simultan di negara-negara ASEAN-7 pada periode 1998-2013.
2. Untuk menganalisis pengaruh liberalisasi perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan impor secara parsial di negara-negara ASEAN-7 pada periode 1998-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pengetahuan dan wawasan tentang liberalisasi perdagangan pada perkembangan teori perdagangan internasional.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang ingin meneliti lebih lanjut tentang liberalisasi perdagangan suatu negara dalam perdagangan internasional.

1.5 Sistematika Penelitian Skripsi

Sistematika penelitian skripsi ini, terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan dan disesuaikan dengan materi pembahasan, sehingga akan didapatkan penjelasan mengenai latar belakang hingga hasil dan saran. Sistematika penulisan masing-masing bab terdiri sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang mendasari penelitian, rumusan masalah yang akan disajikan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Selain itu juga dikemukakan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian. Selanjutnya diuraikan pula hipotesis, model analisis, dan kerangka berpikir yang akan digunakan berdasarkan latar belakang.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variable, definisi operasional tiap variable, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis yang digunakan untuk melihat hasil dalam penelitian ini.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi gambaran umum obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis model dan pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian dan saran yang diajukan penulis berdasarkan penelitian

Daftar Pustaka

Lampiran

